KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 15 November 2018

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Kamis, 15 November 2018	KEK Pariwisata Tetap Dapat Pendampingan	Kementerian Pariwisata optimistis penetapan target tiga kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata di setiap provinsi dapat mendorong kemudahan perizinan, insentif dari pemerintah, dan kemudahan potensi informasi investasi. Pusat juga akan terus membantu mempromosikan daerah. Hengky Manurung, Asdep investasi pariwisata Kemenpar, mengatakan meskipun ada target dan dukungan Kemenpar, pelaksanaan KEK Pariwisata di daerah bukanlah program yang berjalan tanpa hambatan.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Kamis, 15 November 2018	Saat Bali Gencar Mengejar Pemerataan Ekonomi	Jalan pintas Mengwitani-Singaraja, Jalan tol Denpasar-Gilimanuk, Bandara Bali Utara, hingga jalur kereta api menjadi bagian dari segudang mimpi besar pemerintah daerah Bali yang tengah mengupayakan pemerataan ekonomi. Mulai akhir tahun ini, satu per satu mimpi itupun direalisasi.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 22)	Kamis, 15 November 2018	5 KEK Pariwisata Ditetapkan 2019	Kementerian Pariwisata menargetkan lima usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dapat ditetapkan pada tahun depan, Ketua Tim Percepatan Kawasan Pariwisata Kemenpar Azwir Malaon mengatakan, pihaknya tengah melakukan percepatan pembentukan lima KEK Pariwisata lainya. Kelima KEK pariwisata itu antaralain Mentawai, Sumatera Barat, Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, Pangandaran, Jawa Barat; Selayar, Sulawesi Selatan;dan Tanjung Pulisan Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 15 November 2018	Pemerintah Ajukan Pinjaman Ke China	Pemerintah Bakal mengajukan pinjaman kepada China sebesar Rp 3,50 triliun untuk membangun jalan tol Serang- Panimbang sepanjang 33 kilometer. Pembangunan jalan tol sepanjang itu menjadi bagian pemerintah dari total 83,68 kilometer. Selebihnya dibangun oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mendapat konsesi jalan tol tersebut. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian pupr Sugiyartanto mengatakan bahwa keberadaan jalan tol tersebut akan menjadi akses utama ke kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, Banten.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 15 November 2018	KPBU Dorong Keahlian Khusus	Asosiasi konsultan menilai bahwa kebutuhan jasa konsultan akan semakin mengerucut pada keahlian khusus atau spesialisasi sejalan dengan perkembangan proyek-proyek kerja sama di sektor infrastruktur.
6	Kompas (Halaman Utama)	Kamis, 15 November 2018	Berita Foto	Proses Pengerjaan proyek tol Cinere-Serpong di Kawasan Cipayung, Tangerang Selatan.
7	Kompas (Halaman, 17)	Kamis, 15 November 2018	Diperlukan Skema Khusus	Rencana penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri disambut positif kalangan pengembang.
8	Kompas (Halaman, 14)	Kamis, 15 November 2018	Kesadaran Masyarakat Rendah	Kesadaran bangsa Indonesia hidup di wilayah rawan bencana alam amat rendah. Berbagai pengalaman kebencanaan yang terjadi belum membentuk upaya mitigasi bencana dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat. Berdasarkan Peta Rawan Bencana (Hazard Maps) 2017, ada 295 sesar aktif yang tersebar di Indonesia, seperti gempa Aceh 2004 dengan magnitudo 9,2.Untuk itu pemerintah perlu membuat peta zonasi wilayah rawan bencana tiap daerah, terutama skala besar minimal 1:25.000. Kini belum semua wilayah di Indonesia punya peta zonasi bencana alam.
9	Kompas (Halaman, 14)	Kamis, 15 November 2018	Lembah Palu, Kini dan Ke Depan	Gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Donggala, dan Sigi pernah terjadi di masa lalu. Selain berbasis sains modern, pembangunan kembali

				pascabencana perlu memperhitungkan pengetahuan lokal warga. Kombinasi gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Donggala, dan Sigi pernah terjadi di masa lalu. Karena itu, pembangunan kembali area itu wajib memperhitungkan keberulangannya agar risiko bencana bisa dikurangi. Bencana ini menampilkan wajah asli bentang alam area itu sebelum diokupasi manusia yang semula patahan kembali merekah, yang awalnya rawa kembalu berlumpur, dan semula laut jadi lautan lagi.

Judul	**KEK Pariwisata Tetap Dapat Pendampingan**	Tanggal	Kamis, 15 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Kementerian Pariwisata optimistis penetapan target tiga kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata di setiap provinsi dapat mendorong kemudahan perizinan, insentif dari pemerintah, dan kemudahan potensi informasi investasi. Pusat juga akan terus membantu mempromosikan daerah. Hengky Manurung, Asdep investasi pariwisata Kemenpar, mengatakan meskipun ada target dan dukungan Kemenpar, pelaksanaan KEK Pariwisata di daerah bukanlah program yang berjalan tanpa hambatan.		

KEK Pariwisata Tetap Dapat Pendampingan

JAKARTA — Kementerian Pariwisata optimistis penetapan target tiga kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata di setiap provinsi dapat mendorong kemudahan perizinan, insentif dari pemerintah, dan kemudahan potensi informasi investasi. Pusat juga akan terus membantu mempromosikan daerah.

Muhamad Wildan
redaksi@bisnis.com

Hengky Manurung, Asdep Investasi Pariwisata Kemenpar, mengatakan meskipun ada target dan dukungan Kemenpar, pelaksanaan KEK Pariwisata di daerah bukanlah program yang berjalan tanpa hambatan.

Menurut Hengky, banyak kawasan yang mengajukan KEK Pariwisata yang belum dikenal oleh orang, sehingga sulit untuk membicarakan potensi wisata dari kawasan tersebut dan pengusulannya pun memakan waktu yang cukup lama.

"Pengusulannya membutuhkan waktu 6 bulan sampai setahun, tetapi itu adalah proses yang harus dilakukan, kalau tidak, tidak bisa ditetapkan," ujar Hengky.

Kemenpar, sebut Hengky, tidak akan lepas tangan dalam menyukseskan KEK Pariwisata, terutama dalam pengembangan sumber daya manusianya (SDM).

"Kami punya Deputi Kelembagaan, kami akan bantu untuk sertifikasi SDM. Bahkan kami sudah punya enam sekolah untuk menampung SDM dari pusat-pusat ekonomi baru. Jadi kami sudah sangat terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah maupun masyarakat," tutumya kepada *Bisnis* di sela-sela acara *Pesawaran Investment Promotion* (PIP) 2018 di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (14/11).

Hengky menegaskan bahwa dicanang-kannya KEK Pariwisata di daerah akan mengundang investasi, mempercepat pembangunan, dan mengundang wisatawan asing ke daerah itu.

Hal ini sudah dicontohkan oleh daerah-daerah lain. "Mandalika, Tanjung Lesung, infrastruktur jadi mudah.

"Tanjung Kelayang sekarang memiliki penerbangan internasional. Morotai sekarang banyak wisatawan Jepang dan China yang kesana. Jadi membangkitkan kunjungan dan niat untuk berinvestasi," tutup Hengky.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Lampung, kemarin memperkenalkan potensi lokalnya kepada calon investor dalam gelaran acara Pesawaran Investor Promotion (PIP) sebagai gelaran PIP yang kedua setelah pertama kali diselenggarakan pada November 2017.

> **Kemenpar tidak akan lepas tangan dalam menyukseskan KEK Pariwisata terutama dalam pengembangan sumber daya manusianya (SDM).**

Pengenalan potensi lokal ini berfokus pada KEK Pariwisata Kecamatan Teluk Pandan yang diperkenalkan langsung oleh Bupati Kabupaten Pesawaran, Dendi Ramadhona.

Selain mengundang Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kemenpar Hengky Manurung, acara ini juga dihadiri Ses. Ditjen PPI Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, kemudian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar, Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago, dan Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika.

Dendi Ramadhona, Bupati Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengatakan bahwa dalam kaitan pembukaan KEK Pariwisata tersebut, Kemenpar membantu pihaknya dalam bentuk pendampingan.

"Kemenpar mendukung kami dalam membuat modelnya. Mereka mendampingi kami sebagai *advisor* dan juga sebagai konsultan terkait dengan pembangunan KEK Pariwisata dan studi kelayakannya," kata Dendi.

DAYA TARIK PESAWARAN

Kabupaten Pesawaran memiliki 39 pulau besar dan kecil, pantai sepanjang 120 km, serta air terjun yang saat ini masih belum terkelola dengan baik.

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesawaran 2017—2031, destinasi wisata yang diprioritaskan itu dibagi menjadi enam kawasan strategis yang mencakup KEK Pariwisata seluas 647 ha di Kecamatan Teluk Pandan yang terdiri dari Blok Pantai Queen Artha seluas 29 ha, Pulau Tangkil seluas 12 ha, Blok Pantai Mutun seluas 253 ha, Pulau Lahu seluas 2 ha, Blok Pantai Ringgu seluas 186 ha, Blok Pulau Tegal seluas 120 ha, Blok Mangrove Ketapang seluas 18 ha, dan Blok Mahitam seluas 27 ha.

Selain memperkenalkan KEK Pariwisata Kecamatan Teluk Pandan, Dendi juga memaparkan Kawasan Industri (KI) Kecamatan Tegineneng seluas 1.200 ha yang telah didukung akses jalan tol Sumatra, Bandara Internasional Raden Intan, jalan lintas Sumatra, dekat dengan ibu kota provinsi yaitu Bandar Lampung. Kawasan ini juga disokong sumber daya sektor agrikultur, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan energi Kabupaten Pesawaran.

Ketika diwawancarai oleh *Bisnis*, Dendi menyatakan bahwa KEK Pariwisata adalah model baru yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada pemerintah pusat melalui konsorsium.

"Jadi ini adalah inisiasi murni dari kami yang ditangkap oleh pemerintah pusat sehingga dijadikan model baru yaitu model konsorsium. Jadi KEK ini bukan aset pemda atau BUMN atau aset negara tapi ini aset punya pribadi," kata Dendi.

Kehadiran KEK Pariwisata yang diinisiasi oleh Pemkab Pesawaran ini mengkoordinasi individu-individu pemilik wahana pariwisata yang sudah ada agar industri pariwisata berkembang lebih cepat dan variatif. Dendi menyatakan bahwa investasi pariwisata sudah masuk di Kabupaten Pesawaran dan sudah ada calon-calon investor yang akan berinvestasi ke Kabupaten Pesawaran.

"Kalau calon-calon investor yang bakal masuk dari SF Marina. Juga ada *floating* hotel. Kemudian akan ada investasi transportasi air karena ada investor yang mau membangun dermaga khusus kepariwisataan," imbuh Dendi.

Dalam pengenalan potensi lokal Kabupaten Pesawaran, Dendi menyatakan, salah satu yang menjadi hambatan KEK Pariwisata adalah kurangnya literasi wisata masyarakat Kabupaten Pesawaran.

Dendi menambahkan, Pemkab Pesawaran terus berusaha menjawab berbagai tantangan yang ada. "Kami bentuk komunitas-komunitas parsial di setiap desa, ada Komunitas Senyum, Komunitas Sadar Wisata, macam macam. yang intinya adalah mengambil beberapa unsur dari Sapta Pesona," tutur Dendi.

Judul	**Saat Bali Gencar Mengejar Pemerataan Ekonomi**	Tanggal	Kamis, 15 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Jalan pintas Mengwitani-Singaraja, Jalan tol Denpasar-Gilimanuk, Bandara Bali Utara, hingga jalur kereta api menjadi bagian dari segudang mimpi besar pemerintah daerah Bali yang tengah mengupayakan pemerataan ekonomi. Mulai akhir tahun ini, satu per satu mimpi itupun direalisasi.		

Saat Bali Gencar Mengejar Pemerataan Ekonomi

redaksi@bisnis.com

Jalan pintas Mengwitani—Singaraja, jalan tol Denpasar—Gilimanuk, Bandara Bali Utara, hingga jalur kereta api menjadi bagian dari segudang mimpi besar pemerintah daerah di Bali yang tengah mengupayakan pemerataan ekonomi. Mulai akhir tahun ini, satu per satu mimpi itu pun direalisasi.

Pada Rabu (14/11), Bali memulai peletakaan batu pertama atau groundbreaking pembangunan jalan pintas Mengwitani menuju Singaraja di titik 5—6 Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali.

Titik ini sekaligus mengawali pembangunan jalan pintas atau *shortcut* yang digadang-gadang akan memperdekat jarak Denpasar dengan Singaraja atau Bali Selatan dengan Bali Utara.

Bagaimana tidak, jika titik 1 sampai 10 rampung pada 2021 nanti, Denpasar menuju Singaraja akan mampu ditempuh hanya dalam 1,5 jam atau jauh lebih singkat dari kondisi sebelumnya yang bisa sampai 2,5 jam.

Ya, pengerjaan memang sengaja dimulai pada titik 5—6 di Desa Sukasada, Buleleng karena memiliki lokasi ekstrem dan kehadirannya lebih dibutuhkan. Sembari mengerjakan titik 5—6, titik 3—4 di Bedugul, Tabanan juga akan mulai digarap. Alasannya sama, titik 3—4 menjadi prioritas karena lokasi dan kebutuhan.

Sisanya, titik 7—8 akan ditarget rampung 2020. Terakhir, titik 9—10 dan 1—2 ditarget rampung 2021.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jatim Bali Kementerian PUPR I Ketut Darmawahana mengatakan titik 1 hingga 4 berada di Tabanan dan titik 5 sampai 10 di kawasan Buleleng. Penyelesaian titik 9—10 dan 1—2 akan mengakhiri proses pembangunan dan merealisasi pengerjaan *shortcut* sepanjang 10 km dari Mengwitani menuju Singaraja tersebut.

"Dari Mengwitani menuju Singaraja ada 10 titik yang diselesaikan. Titik 5—6 dan 3—4 yang pertama diselesaikan mudah mudahan menyusul 1—2, 7—8, 9—10," katanya, Rabu (14/11) di Singaraja.

Titik 5—6 akan sepanjang 1,95 km dengan lebar badan jalan 9 meter dan bahu jalan masing–masing selebar 2 meter. Titik ini akan melewati 10,8 ha lahan milik 25 warga. Saat ini pembebasan lahan juga masih terus dikerjakan.

Pembangunan titik 5—6 ini dinilai akan meningkatkan kenyamanan pengendara. Selama ini, di lokasi *existing* titik 5—6 terdapat jalan dengan kemiringan 8%—12% dengan kecepatan maksimal 40 km per jam dan waktu tempuh 7 menit. Sementara itu, dengan pembangunan *shortcut* titik 5—6 di dekat jalan *existing* akan mempersingkat waktu tempuh menjadi 3 menit dengan kecepatan maksimal menjadi 40 km per jam serta kemiringan jalan 5%.

Selain jumlah tikungan juga akan berkurang. Semula jalan eksting terdapat 15 tikungan, dengan *shortcut* titik 5–6 jumlahnya menjadi 5 tikungan.

"Jadi ini akan meningkatkan kenyamanan pengendara dengan tikungan yang dipotong, waktu tempuh semakin singkat, dan kemiringan makin rendah," katanya.

Pembangunan titik 3—4 ditujukan untuk mengurangi kemacetan di kawasan Kebun Raya Bedugul. Diprediksi, dengan kehadiran titik 3—4 kemacetan akan berkurang 50% di lokasi tersebut.

Titik 3—4 akan sepanjang 1,2 km dengan target penyelesaian pada akhir 2019. Pembebasan lahan juga tidak terlalu sulit sebab jalan akan melalui hutan dan tanah provinsi. "Hanya 1,5 ha lahan milik warga," katanya.

Dengan senyum merekah, Gubernur Bali I Wayan Koster pun semakin optimistis seluruh mimpi infrastruktur itu akan terwujud. Baginya, Bali tanpa infrastruktur memadai tidak akan mampu mewujudkan pemerataan ekonomi.

Dia meyakini dengan pembangunan jalan pintas ini transportasi Bali wilayah selatan dan utara akan semakin lancar sehingga berimplikasi pada perputaran ekonomi. Selain itu pariwisata Bali juga akan semakin berkembang.

Anggaran Rp200 miliar disiapkan Pemprov Bali untuk melaksanakan studi kelayakan dan pembebasan seluruh lahan yang dilalui jalan pintas tersebut. Sementara itu, untuk pembangunan akan menggunakan anggaran pemerintah pusat.

Walaupun hingga saat ini belum bisa ditotal berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk merampungkan jalan pintas dari titik 1 sampai 10. Hanya titik 5—6 dan 3—4 yang anggaran pembangunannya telah ditentukan yakni masing-masing sebesar Rp140 miliar dan Rp170 miliar.

"Sudah lama keinginan masyarakat Bali untuk punya shortcut, mungkin jodohnya dulu belum, terwujudnya baru kali ini," katanya.

Menurutnya, rampungnya jalan pintas akan menjadi pemantik bagi Bali untuk berpacu dalam melakukan pembangunan tol Denpasar—Gilimanuk. *Shortcut* titik 5—6 dan 3—4 yang akan selesai pada akhir 2019 juga akan semakin mendorong realisasi Bandara Bali Utara yang rencananya akan rampung selama 3 tahun pembangunan.

Bali juga semakin percaya diri untuk mengembangkan infrastruktur laut seperti dermaga cekukan Rawang serta Pelabuhan Cruise Benoa dan Tanah Ampo, Karangasem.

Bahkan, pembangunan jalur kereta api juga akan segera direalisasi. Saat ini, mulai banyak yang berminat melakukan investasi pada infrastruktur tersebut. "Mudah-mudahan akan bisa terwujud. Pihak PT KAI juga siap melakukan presentasi semoga Desember nanti sudah ada persiapan," katanya. (k22)

Judul	**5 KEK Pariwisata Ditetapkan 2019**	Tanggal	Kamis, 15 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 22)		
Resume	Kementerian Pariwisata menargetkan lima usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dapat ditetapkan pada tahun depan, Ketua Tim Percepatan Kawasan Pariwisata Kemenpar Azwir Malaon mengatakan, pihaknya tengah melakukan percepatan pembentukan lima KEK Pariwisata lainya. Kelima KEK pariwisata itu antaralain Mentawai, Sumatera Barat, Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, Pangandaran, Jawa Barat; Selayar, Sulawesi Selatan;dan Tanjung Pulisan Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Lima KEK ini akan menambah daftar KEK yang sudah ditetapkan belum lama ini. Terdapat tujuh KEK Pariwisata yang sudah ditetapkan yakni KEK Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, Tanjung Gunung, Sungailiat, dan Singasari.		

5 KEK Pariwisata Ditetapkan 2019

JAKARTA — Kementerian Pariwisata menargetkan lima usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dapat ditetapkan pada tahun depan.

Ketua Tim Percepatan Kawasan Pariwisata Kemenpar Azwir Malaon mengatakan, pihaknya tengah melakukan percepatan pembentukan lima KEK Pariwisata lainnya.

Kelima KEK Pariwisata itu a.l. Mentawai, Sumatra Barat; Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat; Pangandaran, Jawa Barat; Selayar, Sulawesi Selatan; dan Tanjung Pulisan Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

"Tahun ini diharapkan dapat segera dibahas Tim Pelaksana Dewan Nasional dan tahun depan di sidang dewan nasional," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (14/11).

Lima KEK ini akan menambah daftar KEK yang sudah ditetapkan belum lama ini. Terdapat ketujuh KEK Pariwisata yang sudah ditetapkan yakni KEK Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, Tanjung Gunung, Sungailiat, dan Singasari.

"Selain lima KEK yang akan ditetapkan pada tahun depan, juga ada 17 KEK lainnya yang usulannya masih diproses," ucap Azwir.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan, usulan KEK Pangandaran dikhususkan untuk wisata bahari, sedangkan KEK Sukabumi untuk agrowisata.

Pembangunan dua KEK itu direncanakan berlangsung pada 2019 setelah disetujui oleh Kemenko Perekonomian.

Adapun, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dua KEK tersebut sekitar Rp8 triliun. "Saya berharap KEK Pariwisata ini dapat berkontribusi mendatangkan wisman," katanya.

Menurutnya, pariwisata merupakan suatu bisnis yang berkaitan dengan perizinan atau birokrasi, sehingga perizinan bisa dimudahkan dengan KEK. Dia berharap setiap daerah bisa mengusulkan adanya KEK Pariwisata.

"Saya berharap Indonesia punya 100 KEK. Berarti, setiap provinsi masing-masing punya tiga. Contoh KEK adalah seperti di Nusa Dua atau di Mandalika, semua pembangunannya cepat. Di Mandilaka, Lombok mau ada lintasan MotoGP," terangnya.

Kendati demikian, Menpar tak memungkiri membangun KEK Pariwisata di sebuah daerah bukanlah sebuah perkara yang mudah. "Memang membuat KEK itu tidak mudah, tapi setelah memiliki KEK akan banyak kemudahan," ucapnya.

Nantinya, pemerintah pusat akan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan utilitas dari pasar, jalan, air, listrik, internet, hingga bandara. "Selain mendukung investasi pariwisata masuk juga berdampak mendukung wisman yang datang ke Indonesia," tutur Arief. ***(Yanita Petriella)***

Judul	**Pemerintah Ajukan Pinjaman Ke China**	Tanggal	Kamis, 15 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Pemerintah Bakal mengajukan pinjaman kepada China sebesar Rp 3,50 triliun untuk membangun jalan tol Serang- Panimbang sepanjang 33 kilometer. Pembangunan jalan tol sepanjang itu menjadi bagian pemerintah dari total 83,68 kilometer. Selebihnya dibangun oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mendapat konsesi jalan tol tersebut. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian pupr Sugiyartanto mengatakan bahwa keberadaan jalan tol tersebut akan menjadi akses utama ke kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, Banten.		

Pemerintah Ajukan Pinjaman ke China

JAKARTA — Pemerintah bakal mengajukan pinjaman kepada China sebesar Rp3,50 triliun untuk membangun jalan tol Serang—Panimbang sepanjang 33 kilometer.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Pembangunan jalan tol sepanjang itu menjadi bagian pemerintah dari total 83,68 kilometer. Selebihnya dibangun oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mendapat konsesi jalan tol tersebut.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Sugiyartanto mengatakan bahwa keberadaan jalan tol tersebut akan menjadi akses utama ke kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, Banten.

"Kami baru ajukan *loan* ke China untuk yang 33 kilometer. Progres [porsi] BUJT sendiri cukup signifikan karena tidak ada deviasi dari *schedule* yang mereka tetapkan," ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Menurut Sugiyartanto, Ditjen Bina Marga tengah menyusun *detail engineering design* untuk jalan tol yang menjadi

> **Kementerian PUPR harus menyelesaikan tahapan progres yang menjadi salah satu persyaratan.**

porsi pemerintah. Kontrak pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan bisa ditandatangani pada medio 2019.

Sugiyartanto menuturkan bahwa fasilitas pinjaman dari China sudah tersedia. Namun, Kementerian PUPR harus menyelesaikan tahapan progres yang menjadi salah satu persyaratan.

Fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen yang sudah disepakati Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China pada 2015. Sejumlah ruas tol yang dibiayai pinjaman dari China antara lain Cileunyi—Sumedang—Dawuan, Manado—Bitung, Ngawi—Kertosno, dan Balikpapan—Samarinda.

Pinjaman dari China merupakan sumber baru dalam pembiayaan jalan tol Serang—Panimbang porsi pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian PUPR berniat menggunakan anggaran negara dengan skema ketersediaan layanan atau *availability payment*.

Skema ketersediaan layanan merupakan pembayaran secara berkala oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), per 8 November 2018, progres pembebasan lahan telah mencapai 54%, sedangkan konstruksi sebesar 14%.

Pembangunan jalan tol Serang—Panimbang terbagi menjadi tiga seksi, yaitu seksi 1 Serang—Rangkasbitung (26,50 kilometer), seksi 2 Rangkasbitung—Bojong (33 kilometer), dan seksi 3 Bojong—Panimbang (24,41 kilometer).

BERSIAP DIVESTASI

Pada perkembangan lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bersiap melakukan divestasi ruas Serang—Panimbang.

Direktur Utama WIKA Tumiyana mengatakan bahwa sejumlah pihak telah menyatakan ketertarikan untuk mengambil alih saham perseroan di PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

Di BUJT tersebut, WIKA menguasai saham hingga 80%. "Serang—Panimbang sudah kami tawarkan ke mana-mana dan banyak yang berminat," ujarnya.

Menurutnya, divestasi merupakan bagian dari strategi perseroan dalam mengelola portofolio di jalan tol.

Dana hasil divestasi, lanjut Tumiyana, akan digunakan untuk moda ekspansi ke portofolio yang baru. B

Keberadaan Tol Mendukung Aksesibilitas Banten Selatan

Pembangunan jalan tol Serang—Panimbang dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas Banten Selatan dan mendukung perekonomian di KEK Tanjung Lesung serta untuk menunjang percepatan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunannya selain melalui badan usaha jalan tol (BUJT), sebagian juga dikerjakan oleh pemerintah. Berikut ini, data teknis dan investasi oleh badan usaha.

Profil Tol Serang—Panimbang Bagian BUJT

- **Badan usaha:** PT Wijaya Karya Serang Panimbang
- **Pemegang saham:** PT Wijaya Karya Tbk. (80%), PT Pembangunan Perumahan Tbk. (15%), dan PT Jababeka Infrastruktur (5%)
- **Panjang:** 50,67 kilometer
- **Jumlah seksi:** 3
- **Biaya investasi:** Rp5,33 triliun
- **Biaya konstruksi:** Rp3,56 triliun
- **Volume lalu lintas:** 13.743 kendaraan per hari (2019) Operasi: 2019
- **Masa Konsesi:** 40 tahun
- **Tarif (golongan I) :** Rp1.000/km (2018)
- **Tanda tangan kontrak :** Tanda tangan PPJT; 22 Feb 2017

Sumber: Kementerian PUPR, September 2018 BISNIS/RAKHMAD DID

Judul	**KPBU Dorong Keahlian Khusus**	Tanggal	Kamis, 15 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Asosiasi konsultan menilai bahwa kebutuhan jasa konsultan akan semakin mengerucut pada keahlian khusus atau spesialisasi sejalan dengan perkembangan proyek-proyek kerja sama di sektor infrastruktur.		

KPBU Dorong Keahlian Khusus

JAKARTA — Asosiasi konsultan menilai bahwa kebutuhan jasa konsultan akan semakin mengerucut pada keahlian khusus atau spesialisasi sejalan dengan perkembangan proyek-proyek kerja sama di sektor infrastruktur.

Untuk itu, asosiasi konsultan juga tengah menggenjot kapasitas dan kompetensi untuk menaup peluang.

Wakil Ketua Umum Bidang Penata Usaha dan Profesi DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Ronald Sihombing mengatakan bahwa skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) melibatkan banyak pihak dalam setiap tahapan proyek.

Skema itu juga membuat perencanaan dan pembangunan proyek terintegrasi.

"Proyek-proyek ini menjadi peluang bagi dunia usaha konsultan dan sektor yang beragam membuat [kebutuhan jasa konsultan] lebih spesifik sehingga mengarah pada spesialisasi," ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), per 31 Oktober 2018 terdapat 26 proyek KPBU yang masih dalam tahap perencanaan dan penyiapan. Sebanyak 15 proyek ini bernilai US$2,78 miliar, sedangkan 11 proyek lain masih dihitung.

Proyek yang ditawarkan kepada badan usaha ini tersebar dari proyek jalan tol, preservasi jalan, penerangan jalan umum, air minum, dan kawasan industri.

Menurut Ronald, tren spesialisasi jasa konsultan bakal mendorong industri konsultan yang sehat karena saat ini sebagian besar konsultan merupakan konsultan umum.

Berdasarkan UU Jasa Konstruksi, klasifikasi jasa konsultan umum meliputi arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, dan arsitektur lansekap serta perencanaan wilayah. Sementara itu, klasifikasi khusus mencakup konsultasi ilmiah dan teknis, serta pengujian dan analisis teknis. (Rivki Maulana)

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Kamis, 15 November 2018
Media	Kompas (Halaman Utama)		
Resume	Proses Pengerjaan proyek tol Cinere-Serpong di Kawasan Cipayung, Tangerang Selatan.		

Jalan Tol Cinere-Serpong

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Proses pengerjaan proyek Tol Cinere-Serpong di kawasan Cipayung, Tangerang Selatan, Rabu (14/11/2018). Proyek senilai Rp 2,1 triliun itu terbentang sepanjang 10,14 kilometer dan menjadi penghubung antara Jalan Tol Cinere-Jagorawi dan Jalan Tol Kunciran-Serpong. Jalan bebas hambatan ini ditargetkan rampung pada 2019 dan bisa mempercepat akses transportasi di sisi selatan Jakarta.

Judul	**Diperlukan Skema Khusus**	Tanggal	Kamis, 15 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 17)		
Resume	Rencana penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri disambut positif kalangan pengembang.		

Diperlukan Skema Khusus

JAKARTA, KOMPAS — Rencana penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri disambut positif kalangan pengembang. Namun, untuk memenuhi kebutuhan hunian yang mencapai 1 juta unit tersebut, diperlukan skema khusus.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyambut positif rencana itu. Menurut dia, sudah ada komunikasi pemerintah dengan REI. Akan tetapi, tetap perlu dibuat skema pembiayaan yang sesuai dengan profil ASN, TNI dan Polri.

"Semisal ada ASN yang belum punya rumah, tetapi ternyata gajinya sudah lebih tinggi daripada skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang ada saat ini. Atau mungkin ASN sudah punya kredit barang, seperti kendaraan," kata Soelaeman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Berdasarkan laporan kepada Presiden, ada 945.000 aparatur sipil negara (ASN), 275.000 anggota TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah. Menurut rencana, pembiayaan perumahan yang layak untuk ASN serta anggota TNI dan Polri akan bersumber dari anggaran nonpemerintah, seperti asuransi (*Kompas*, 17/4/2018).

Dari sisi penyediaan hunian, lanjut Soelaeman, penyediaan lahan merupakan persoalan paling krusial. Jika tanah yang tersedia milik pemerintah, sangat sulit untuk dialihkan sebagai hak milik. Sementara tanah yang harganya murah kebanyakan di pinggiran kota atau luar kota.

Akan tetapi, Soelaeman optimistis program tersebut berjalan lancar karena kebanyakan pengembang masih memiliki cadangan tanah yang bisa digunakan untuk keperluan itu.

Selain itu, kebijakan relaksasi rasio pinjaman terhadap aset (LTV) membuat perbankan lebih fleksibel dalam merancang skema pembiayaan bagi calon debitor. "Saat ini sudah ada ASN yang membeli rumah dengan memanfaatkan skema FLPP. Namun, dengan program ini, akan ada perlakuan lebih khusus," ujarnya.

Sekretaris Jenderal REI Totok Lusida menambahkan, pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah berkomunikasi dengan REI agar mendukung rencana ini. REI mengusulkan kebijakan khusus terkait pertanahan, pembiayaan, dan perizinan untuk mendukung program ini.

Menurut Totok, sumber pembiayaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri direncanakan berasal dari Taspen sehingga pembayaran angsurannya dimungkinkan hingga 30 tahun. Oleh karena itu, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Taspen untuk keperluan penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri itu.

Skema lain yang akan digunakan adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Melalui skema ini, penyediaan lahan dilakukan pengembang, sedangkan infrastruktur akan dibangun pemerintah pusat. Dengan demikian, harga rumah bisa ditekan.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, rencana penyediaan rumah bagi ASN, TNI dan Polri masih dibahas. (NAD)

Judul	**Kesadaran Masyarakat Rendah**	Tanggal	Kamis, 15 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Kesadaran bangsa Indonesia hidup di wilayah rawan bencana alam amat rendah. Berbagai pengalaman kebencanaan yang terjadi belum membentuk upaya mitigasi bencana dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat. Berdasarkan Peta Rawan Bencana (Hazard Maps) 2017, ada 295 sesar aktif yang tersebar di Indonesia, seperti gempa Aceh 2004 dengan magnitudo 9,2.Untuk itu pemerintah perlu membuat peta zonasi wilayah rawan bencana tiap daerah, terutama skala besar minimal 1:25.000. Kini belum semua wilayah di Indonesia punya peta zonasi bencana alam.		

Kesadaran Masyarakat Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Kesadaran bangsa Indonesia hidup di wilayah rawan bencana alam amat rendah. Berbagai pengalaman kebencanaan yang terjadi belum membentuk upaya mitigasi yang kuat. Peran pemerintah melalui kebijakan mitigasi bencana dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat.

Berdasarkan Peta Rawan Bencana (Hazard Maps) 2017, ada 295 sesar aktif yang tersebar di Indonesia. Gempa dengan skala terbesar dunia pernah terjadi di Indonesia, seperti gempa Aceh 2004 dengan magnitudo 9,2.

"Jadi soal kebencanaan nyata di depan mata dan bisa terjadi kapan saja. Namun, kesadaran soal itu belum terbangun di masyarakat, termasuk pada pemerintah, DPR, serta pemangku kepentingan lain. Selama ini seperti hanya tahu bahaya bencana, tanpa keberlanjutan upaya," tutur Guru Besar Institut Teknologi Bandung Teuku Abdullah Sanny di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Perubahan menyeluruh amat dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia. Hal itu terkait dengan kebijakan, pengadaan dana mitigasi, dan kepatuhan pembangunan berbasis zonasi rawan bencana. Upaya mitigasi juga termasuk pada pendidikan rutin untuk pelatihan evakuasi bencana.

Peta zonasi

Untuk itu, pemerintah perlu membuat peta zonasi wilayah rawan bencana tiap daerah, terutama skala besar minimal 1:25.000. Kini belum semua wilayah di Indonesia punya peta zonasi bencana alam. Peta itu dipakai untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Peneliti Madya Bidang Geoteknik Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adrian Tohari, menambahkan, masyarakat terkesan abai akan besarnya bahaya bencana alam di Indonesia. Berbagai penelitian bencana menunjukkan kerentanan Indonesia terhadap bencana.

Salah satu kondisi yang juga perlu diwaspadai ialah risiko likuefaksi di Indonesia. Setidaknya tujuh kota besar di Indonesia rentan likuefaksi, yakni Banda Aceh (Aceh), Padang (Sumatera Barat), Bengkulu (Bengkulu), Bantul (Yogyakarta), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Maumere (Nusa Tenggara Timur), dan Palu (Sulawesi Tengah).

Likuefaksi adalah hilangnya kekuatan lapisan tanah pasir lepas akibat kenaikan tekanan air tanah saat gempa kuat dengan durasi lama. Kondisi itu mengakibatkan lapisan tanah pasir menjadi seperti cairan sehingga bergerak mengalir atau tersembur lewat rekahan.

"Upaya paling mudah dilakukan dalam mitigasi likuefaksi ialah menghindari area rentan likuefaksi. Caranya, dengan melihat peta atau mempelajari kondisi geologi dan hidrologi lingkungan sekitar," kata Adrian. (TAN)

Judul	**Lembah Palu, Kini dan Ke Depan**	Tanggal	Kamis, 15 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Donggala, dan Sigi pernah terjadi di masa lalu. Selain berbasis sains modern, pembangunan kembali pascabencana perlu memperhitungkan pengetahuan lokal warga. Kombinasi gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Donggala, dan Sigi pernah terjadi di masa lalu. Karena itu, pembangunan kembali area itu wajib memperhitungkan keberulangannya agar risiko bencana bisa dikurangi. Bencana ini menampilkan wajah asli bentang alam area itu sebelum diokupasi manusia yang semula patahan kembali merekah, yang awalnya rawa kembalu berlumpur, dan semula laut jadi lautan lagi.		

Lembah Palu, Kini dan ke Depan

Gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Donggala, dan Sigi pernah terjadi di masa lalu. Selain berbasis sains modern, pembangunan kembali pascabencana perlu memperhitungkan pengetahuan lokal warga.

Kombinasi gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Donggala, dan Sigi pernah terjadi di masa lalu. Karena itu, pembangunan kembali area itu wajib memperhitungkan keberulangannya agar risiko bencana bisa dikurangi.

Bencana ini menampilkan wajah asli bentang alam area itu sebelum diokupasi manusia: yang semula patahan kembali merekah, yang awalnya rawa kembali berlumpur, dan semula laut jadi lautan lagi.

Retakan tanah di Kota Palu memanjang ke selatan sampai Kabupaten Sigi, membelah jalan dan menghancurkan bangunan di atasnya, seperti di Desa Beka, Kecamatan Marawola. "Dalam bahasa Kaili, *beka* artinya terbelah. Kini kampung kami terbelah lagi," ujar Baeri (60), warga Desa Beka.

Rekahan itu jadi manifestasi jalur patahan aktif Palukoro di permukaan (*surface rupture*). Survei peneliti dari Pusat Studi Gempa Bumi Nasional, Mudrik Rahmawan Daryono dan Danny Hilman Natawidjaja, menemukan, panjang retakan di darat 70 kilometer (km) dan di laut 80 km. Lebar retakan menandai pergeseran tanah secara lateral maksimal 3,8 meter. Selain itu, ada pergeseran tanah secara vertikal sampai 3,5 meter.

"Retakan memanjang menandai jalur sesar aktif. Kalau ada gempa, jalur itu bancur lagi," kata Danny, yang juga peneliti di Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Tsunami mengembalikan wajah area pesisir itu sebelum direklamasi dan diseseki hunian. Jupri Amin (63), nelayan Majene, Sulawesi Barat, yang menetap di Kampung Muara, Donggala, mengatakan, hingga 1970-an belum banyak warga tinggal di pesisir Teluk Palu. "Pantai diuruk karena rumah panggung jadi tembok," katanya.

Awal 1970-an, banyak nelayan Majene dan area lain terdampak gempa dan tsunami tahun 1968 berpindah ke Teluk Palu. "Saat gempa dan tsunami, banyak rumah roboh di Majene lalu saya pindah kemari, kini kena tsunami lagi," ujarnya. Setelah gempa 28 September 2018, Kampung Muara longsor ke laut bersama 41 warga.

Sejumlah survei menemukan banyak longsoran di perbukitan sekeliling Teluk Palu hingga hilangnya daratan ke laut. Jejak longsoran ditemukan di dasar laut dan diduga menjadi penyebab utama tsunami di Teluk Palu.

"Kami menemukan tujuh lokasi longsoran ke laut. Selain itu, daratan hilang seperti Kampung Muara. Banyak daratan hilang itu hasil reklamasi," kata Purna S Putra, peneliti geologi dan paleotsunami dari Pusat Geoteknologi LIPI.

Di Pantai Talise, Palu, gempa dan tsunami menyingkap ada dermaga tua dibangun pada zaman Belanda ditimbun reklamasi dan jalan aspal sejak 1980-an. Tiang besi menyembul dari laut, di ujung jalan aspal area longsor.

Sekitar 300 meter dari lokasi itu, Purna menemukan empat lapis tsunami tua di bawah endapan tsunami 28 September 2018. Jadi, area itu dilanda lima kali tsunami. Penggalian lebih dalam kemungkinan akan menemukan lapisan tsunami lagi.

Meski studi paleo-likuefaksi untuk mencari jejak likuefaksi masa lalu belum dilakukan, pengetahuan lokal warga Kaili merekamnya menandakan itu terjadi di masa lalu. Istilah lokal likuefaksi adalah *nalodo* yang berarti ambles di lumpur hitam dengan istilah *lanjo* atau terbenam.

"Daerah di Perumnas Balaroa yang kena likuefaksi namanya dulu Tagari Lonjo atau terbenam di lumpur pekat. Petobo hingga 1978 masuk Biromaru, artinya rumput di rawa membusuk," kata arkeolog yang juga Wakil Kepala Museum Daerah Sulawesi Tengah, Iksam.

Mengacu pada peta yang dibuat Albertus Christiaan Kruyt (1919), area likuefaksi dulu ialah bekas sungai lama. "Area seperti Petobo dan Balaroa tak dihuni hingga 1970-an," ujarnya.

Dari sebaran tinggalan arkeologi, seperti pecahan tembikar, ada hunian kuno di punggungan bukit. "Tanah Lembah Palu dulu ialah punggungan dan paritan, tetapi yang dipilih jadi hunian dulu punggungan. Saat Palu dikembangkan, banyak rumah dibangun di paritan," ujarnya.

Berbasis mitigasi

Kehancuran dan banyaknya korban kali ini buah dari pengabaian risiko bencana. Pada 30 Juli 2018, Mudrik Darmawan dan tim Ekspedisi Palu Koro memaparkan hasil kajian mereka kepada Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. Mudrik menyerahkan peta Sesar Palukoro yang dibuatnya untuk studi disertasi pada 2016.

"Kami menyimpan video pertemuan itu. Pemerintah tidak responsif pada kajian bencana itu, Gubernur tak percaya dengan tim geolog. Sebab, dulu Prof JA Katili (Direktur Jenderal Pertambangan Umum pada 1973-1984) menyatakan Palu akan hancur karena gempa, tapi tak terjadi dan membuat warga takut," kata Neneng Susilawati, tim dokumentasi Ekspedisi Palukoro.

Seperti daerah lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten atau kota di bawahnya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Gempa 28 September 2018 menyadarkan banyak pihak. Longki menyatakan, akan membangun kembali area yang hancur. Rencana Tata Ruang Wilayah Sulteng akan direvisi berbasis mitigasi bencana. "November ini revisi RTRW selesai," ujarnya.

Belajar dari banyak kasus rekonstruksi daerah terdampak bencana seperti Aceh setelah 2004, pembangunan Sulteng harus hati-hati. Pemulihan Aceh yang cepat secara sosial ekonomi dinilai abai dengan ancaman gempa dan tsunami. Warga Aceh kini tumbuh memadat di tapak tsunami di pesisir. Fenomena serupa terjadi di Pangandaran setelah tsunami 2006.

Daerah terdampak bencana harus dibangun kembali jadi lebih baik dan aman. Ada banyak pelajaran harus jadi panduan pembangunan setelah bencana. Daya dukung lingkungan rendah dan tingginya ancaman beragam bencana menjadi tantangan.

Apalagi sikhas gempa di Palu amat pendek, bahkan terpendek di Indonesia karena pergerakannya aktif. Di masa lalu, keberulangan ancaman gempa diantisipasi warga Sulteng dengan rumah panggung dari kayu. Hingga 1970-an, mayoritas bangunan berarsitektur tradisional ini. Dalam gempa ini, sejumlah bangunan kayu bertahan.

Bangunan tradisional dari kayu tahan gempa dan paksa membangunnya dikuasai para tukang kayu kita. Jika warga membangun kembali rumah tembok, perlu pendampingan para ahli, mengingat material itu ialah kebudayaan baru.

Bangunan yang dilintasi jalur sesar aktif perlu dipindahkan, minimal 50 meter. Jalur patahan aktif itu perlu dijadikan ruang terbuka hijau sekaligus museum demi mengingatkan warga tentang bencana mematikan yang bisa kembali terjadi.

Kawasan itu juga punya banyak sumber tsunami, dari Sesar Palukoro pemicu longsor bawah laut, atau sumber lain di luar Teluk Palu. Seperti kejadian lalu, tsunami di Teluk Palu melanda 3 menit setelah gempa sehingga sulit diantisipasi. "Tsunami dipicu longsor sulit diperkirakan tinggi dan waktu tiba karena dipengaruhi volume material masuk laut," kata ahli tsunami BPPT, Widjo Kongko.

Terkait ancaman likuefaksi, risikonya tinggi dan tersebar mengingat struktur tanah di area itu, terutama Palu, lunak dan terdiri dari lapisan pasir tebal. Menurut peneliti likuefaksi Geoteknologi LIPI, Adrin Tohari, butuh pemetaan geologi dan geoteknik struktur dan kepadatan lapisan tanah untuk mengetahui bahayanya. "Daerah terkena likuefaksi, seperti Kelurahan Petobo, Balaroa, dan Jono Oge, tak layak huni karena lapisan tanah rentan kena gempa," ujarnya.

Iksam mengatakan, selain berbasis sains modern, pembangunan kembali pascabencana perlu memperhitungkan pengetahuan lokal warga, termasuk mempelajari pola migrasi dan toponimi wilayah. "Jangan sampai memindahkan korban bencana ke ancaman bencana lain.

(AHMAD ARIF)

Peta Observasi Gempa Palu

Salah Satu Daerah yang Hilang Pascagempa